BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Televisi sebagai bagian dari kebudayaan audio–visual merupakan media paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan oleh satelit dan pesatnya perkembangan jaringan televisi yang menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Kultur yang dibawa televisi dengan sendirinya mulai tumbuh di masyarakat. Apalagi sesungguhnya yang esensial dari kultur ini pada hakikatnya sudah dikenal sejak lama sebelum kebudayaan tulis atau cetak menggesernya. Unsur esensial dari kebudayaan televisi berupa penggunaan bahasa verbal dan visual, sekaligus dalam rangka menyampaikan sesuatu seperti pesan, informasi, pengajaran, ilmu, dan hiburan.

Beragam kemajuan yang telah dicapai di zaman modern saat ini membawa perubahan disegala bidang. Manusia mendapatkan segala kemudahan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam hal teknologi komunikasi dan informasi, hasil kemajuan yang telah dicapai dibidang ini

secara langsung ataupun tidak langsung telah membawa pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan tekhnologi dan komunikasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentukan pendapat umum, penyampaian berita terkini, dengan menggunakan sentuhan–sentuhan teknologi modern, baik melalui media cetak seperti buku, koran, majalah, tabloid, maupun media elektronik seperti radio, televisi, film, internet dan lain sebagainya.

Televisi menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memperoleh informasi di berbagai penjuru dunia. Adapun informasi yang diinginkan masyarakat mengenai daerah sekitar tentunya televisi yang ditonton adalah televisi lokal. Seperti masyarakat wilayah Jawa Barat menonton televisi lokal Jawa Barat, Sedangkan masyarakat Kalimantan Selatan menonton televisi yang menayangkan informasi–informasi tentang Kalimantan Selatan pula.

Siaran–siaran televisi lokal yang ada khususnya di Kalimantan Selatan mulai beragam. Banyak konten yang dimuat dari siaran–siaran baru, seiring berkambangnya produksi pertelevisian di daerah Kalimatan Selatan. Baik dari televisi nasional yaitu TVRI, maupun televisi swasta seperti Duta TV, Banjar TV, Kompas TV. Sehingga perlu adanya pengawasan yang khusus mengawasi siaran–siaran televisi lokal Banjarmasin khususnya.

Masyarakat Banjarmasin mayoritas beragama Islam, dan dikenal sangat religius. Tentunya tontonan yang masyarakat Banjarmasin tonton juga lebih kepada tontonan yang bernuansa Islami, seperti ceramah–ceramah agama, film–film keagamaan, dan lain–lain di samping siaran-siaran TV Nasional yang menyiarkan berbagai program-programnya yang beragam pula.

Seiring berkembangnya industri pertelevisisan ini pun tentunya banyak mengalami kendala-kendala yang harus diperhatikan dari segi penayangan maupun isi siaran, baik dari masyarakat sendiri maupun lembaga yang bertanggung jawab terhadap siaran-siaran pertelevisian.

Komisi Penyiaran Indonesi (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat Provinsi). Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan peranannya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non-PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran

harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 3 :

> "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."[1]

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antara kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, penganduan masyarakat, advokasi dan literasi media.[2]

Pengawasan isi siaran yaitu mengawasi tayangan televisi khususnya yang ada di Banjarmasin jika terdapat tayangan yang mengandung unsur kekerasan khususnya, kemudian akan ditindak lanjuti demi menciptakan tontonan yang sesuai dengan peraturan KPID.

---

[1] Republik Indonesia, " Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Jakarta: Dharma Bhakti), h.4.

[2] KPI, *Profil KPI*, (Online), tersedia di http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi. Diakses tanggal 7 desember 2015.

Pengaduan masyarakat menjadi salah satu pengawasan KPID sebagai lembaga pengawasan isi siaran. Yaitu membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap tayangan yang mengandung kekerasan, dan kemudian diadukan sesuai fakta yang ada. Dalam hal ini KPID membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Siaran (KMPS).

Stasiun televisi lokal dan televisi nasional memang beragam, baik televisi milik pemerintah maupun televisi swasta bersaing satu sama lain membuat program-program siaran yang menarik, berita-berita yang *update*, agar menjadi siaran yang paling diminati pemirsa atau masyarakat. Meski demikian, stasiun-stasiun televisipun harus memperhatikan aturan-aturan main dalam menyiarkan televisi sehingga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya televisi lokal yang untuk masyarakat itu sendiri.

Pengawasan-pengawasan ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pertelevisian dan radio. Dimana selain mengawasi siaran-siaran televisi nasional maupun lokal, lembaga penyiaran ini juga menampung kritik, saran maupun aduan masyarakat terhadap siaran yang dianggap mengandung kekerasan atau bahkan tontonan yang tidak sehat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Banjarmasin. Lembaga ini ialah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bergerak menyeluruh atau menjadi pusat dari lembaga-lembaga yang ada di daerah, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID) yang bergerak di daerah-daerah, yang menjadii cabang dari lembaga pusat.

Pengawasan KPID berupa pengawasan terhadap isi siaran yang ditayangkan disetiap stasiun televisi, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dipertegas dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Adapun pengawasan-pengawasan siaran televisi lokal tersebut tentunya juga tidak lepas dari peran serta masyarakat masing-masing daerah. Dalam menciptakan televisi lokal yang baik ditonton oleh masyarakat, masyarakat dituntut untuk menjadi penonton yang cerdas dan kritis. Dengan menyampaikan aduannya kepada lembaga yang bertugas yaitu KPI daerah, dan lembaga penyiaran daerah bertugas menampung dan menindak lanjuti aduan masyarakat.

Penindak lanjutan aduan masyarakat terhadap siaran yang mengandung unsure kekerasan ini sesuai dengan fakta yang ada, jika aduan tersebut benar adanya maka stasiun televisi yang diadukan kemudian diberi peringatan, sehingga peranan KPID dan masyarakat agar sangat mempengaruhi dalam menciptakan tontonan televisi yang baik untuk ditonton oleh semua kalangan.

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan KPID

Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang mengawasi siaran televisi lokal. Yang mana penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Dalam Mengawasi Siaran Televisi Yang Mengandung Kekerasan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yg dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Tontonan televisi apa saja yang mengandung kekerasan menurut KPID Kalimantan Selatan ?
2. Apa saja yang dilakukan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi lokal di Kalimantan Selatan ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka penulis memuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Peranan yang dimaksud disini adalah kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam mengawasi siaran yang mengandung kekerasan untuk masyarakat Banjarmasin.
2. Mengawasi yang dimaksud adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

3. Televisi yang dimaksud adalah televisi lokal yang ada di Banjarmasin yaitu Banjar TV dan Duta TV yang menagdung siaran kekerasan dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2015.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tontonan televisi apa saja yang mengandung kekerasan menurut KPID.
2. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi lokal di Kalimantan Selatan.

E. Signifikasi Penelitian

1. Memperbanyak pengetahuan penulis tentang siaran – siaran yang bagus untuk ditonton.
2. Untuk menambah bahan bacaan di Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya dan Perpustakaan Institut IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
3. Sebagai bahan referensi mahasiswa KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ingin mengetahui peranan KPID dalam mengawasi siaran tv lokal di Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, defenisi operasional, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, yang di dalamnya berisi tentang pengertian komunikasi massa, pengertian peranan, pengertian pengawasan, pengertian siaran, pengertian kekerasan.

Bab III Metode Penelitian, yang di dalamnya berisi tentang jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian, di dalamnya berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Penulis menyajikan data serta memberikan analisis terhadap data yang penulis kumpulkan dengan mengacu pada rumusan masalah yang penulis kemukakan.

Bab V Penutupan, berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan tentang hasil temuan yang penulis teliti untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan saran-saran terhadap lembaga masyarakat yang terkait di dalamnya.